

Pembangunan Manusia Seutuhnya dalam Perspektif Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*: Relevansi dan Tantangan Kontekstual di Indonesia

Bernardus Badj

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

Corresponding author: rolinjanuari@gmail.com

Disubmit: 20-08-2025; Direvisi: 30-09-2025; Disetujui: 14-10-2025

Abstract

This article conceptually examines the concept of integral human development as articulated in Pope John Paul II's 1987 encyclical, *Sollicitudo Rei Socialis*. It assesses its relevance to contemporary development challenges in Indonesia. The study focuses on ethical principles such as human dignity, solidarity, subsidiarity, and social justice, and explores their potential integration into national development policies. The challenges analyzed include socio-economic inequality, the crisis of spirituality and development ethics, and the marginalization of transcendent values in public governance. This research employs a library study method with a hermeneutical approach to the theology of development. The encyclical *Sollicitudo Rei Socialis* serves as the primary text interpreted theologically, while Catholic Church documents, social theology literature, and other academic sources are utilized as secondary references. The findings indicate that the principles of the encyclical bear profound relevance to the values of Pancasila and to the ideals of holistic national development. The integration of spiritual and social dimensions into public policy is considered a crucial requirement for building a more humane, inclusive, and dignified society. Thus, the encyclical can serve as an ethical and theological source of inspiration in shaping a paradigm of integral human development in Indonesia.

Keywords: *Encyclical Sollicitudo Rei Socialis development, solidarity, subsidiarity, social justice, Pancasila*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji secara konseptual gagasan pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana dirumuskan dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (1987) karya Paus Yohanes Paulus II, serta menilai relevansinya bagi tantangan pembangunan kontemporer di Indonesia. Fokus kajian terletak pada prinsip-prinsip etis seperti martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas, dan keadilan sosial, serta kemungkinan integrasinya ke dalam arah kebijakan pembangunan nasional. Tantangan yang dianalisis mencakup ketimpangan sosial-ekonomi, krisis spiritual dan etika pembangunan, serta marginalisasi nilai-nilai transenden dalam tata kelola publik. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan hermeneutik teologi pembangunan. Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dijadikan teks utama yang ditafsirkan secara teologis, sementara dokumen Gereja Katolik, literatur teologi sosial, dan sumber akademik lain berfungsi sebagai referensi pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam ensiklik ini memiliki relevansi mendalam dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita pembangunan nasional yang holistik. Integrasi dimensi spiritual dan sosial dalam kebijakan publik dipandang sebagai syarat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih manusiawi, inklusif, dan bermartabat. Dengan demikian, ensiklik ini dapat dijadikan sumber inspirasi etis dan teologis bagi paradigma pembangunan manusia seutuhnya di Indonesia.

Kata Kunci: *Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis, pembangunan, solidaritas, subsidiaritas, keadilan sosial, dan Pancasila.*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses yang tidak terhindarkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Secara ideal, pembangunan harus berorientasi pada penguatan harkat dan martabat manusia sebagai tujuan utama. Badj menegaskan bahwa pembangunan sejati semestinya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan kolektif sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan (Badj, 2024). Namun, dalam praktiknya pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan dimensi-dimensi kemanusiaan yang lebih mendalam, seperti keadilan sosial, solidaritas, dan martabat manusia.

Dalam konteks ini, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (SRS) (1987) karya Paus Yohanes Paulus II menjadi dokumen penting yang menawarkan paradigma pembangunan manusia seutuhnya, yakni pembangunan yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan etis (SRS art. 12). Ensiklik tersebut menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar akumulasi kekayaan, melainkan proses pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Paus Yohanes Paulus II mengkritisi model pembangunan yang eksploitatif dan teknokratis, serta menyerukan pertobatan struktural dan solidaritas global sebagai dasar pembangunan yang adil dan bermartabat (SRS art. 37). Relevansi pesan ensiklik ini sangat nyata dalam konteks Indonesia, di mana ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan krisis moral masih menjadi tantangan besar.

Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah paradigma pembangunan manusia seutuhnya dalam terang *Sollicitudo Rei Socialis* dapat menjadi alternatif etis dan spiritual bagi pembangunan di Indonesia yang masih sarat dengan ketimpangan dan eksklusi sosial. Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada nilai-nilai utama ensiklik, yaitu solidaritas, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ensiklik ini juga mengajak seluruh pihak, baik Gereja maupun masyarakat sipil, untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan yang membawa kebaikan bagi semua, bukan hanya segelintir kelompok.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas relevansi *Sollicitudo Rei Socialis* dalam konteks pembangunan. Badj (2025) meneliti secara mendalam bagaimana ensiklik ini menawarkan paradigma

pembangunan yang membebaskan dan holistik, serta menegaskan peran Gereja dalam memperjuangkan martabat manusia dan solidaritas dengan kaum miskin. Dede et al. (2023) menekankan bahwa ensiklik tersebut menjadi tonggak penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, dengan menyoroti prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab bersama sebagai prinsip universal yang relevan bagi Indonesia. Terjemahan resmi ensiklik oleh Konferensi Waligereja Indonesia (2017) juga menekankan bahwa solidaritas merupakan jalan menuju perdamaian dan pembangunan sejati, serta menyerukan keterlibatan aktif Gereja dalam mengatasi struktur dosa dan ketidakadilan sosial.

Tulisan ini memberikan dua kontribusi utama. Pertama, kajian tentang pembangunan manusia seutuhnya dalam terang *Sollicitudo Rei Socialis* belum banyak dilakukan secara kontekstual dalam realitas sosial Indonesia. Kedua, tulisan ini mengusulkan bahwa pembangunan yang berakar pada spiritualitas sosial dan solidaritas lintas komunitas dapat menjadi solusi terhadap krisis pembangunan yang cenderung eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan tulisan ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan teologi sosial dan wacana pembangunan kontekstual di Indonesia. Melalui pendekatan *Sollicitudo Rei Socialis*, pembangunan dipahami bukan semata sebagai proyek ekonomi, tetapi sebagai proses pembebasan dan pemuliaan martabat manusia dalam seluruh dimensi kehidupannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual dan normatif, yakni

menganalisis gagasan pembangunan manusia seutuhnya dalam perspektif Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* serta menelaah relevansinya terhadap pembangunan di Indonesia. Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (Johannes Paulus II, 1987/2017, art. 12, hlm. 21) dijadikan sumber primer, karena merupakan dokumen magisterial Gereja Katolik yang secara eksplisit merumuskan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja tentang pembangunan manusia. Sumber sekunder meliputi literatur akademik teologi sosial dan metodologi teologi, dengan rujukan pada Creswell (Creswell 2014: 4–8) untuk kerangka penelitian kualitatif, serta Lonergan (Lonergan, 1973: 240–243) untuk metode berteologi.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan pengelompokan sumber-sumber relevan, baik primer maupun sekunder, berdasarkan tema pembangunan manusia seutuhnya dan konteks pembangunan Indonesia. Proses ini melibatkan pencatatan sistematis dan kategorisasi gagasan kunci dari dokumen ensiklik dan literatur terkait.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik-teologis dan kontekstual. Tahapannya meliputi: (1) reduksi data dengan memilih teks-teks kunci dalam ensiklik; (2) interpretasi teologis dengan memperhatikan kerangka metodologis teologi Lonergan; (3) kontekstualisasi dengan situasi pembangunan Indonesia; dan (4) refleksi normatif yang bertujuan menemukan relevansi ensiklik bagi konteks sosial-ekonomi-politik Indonesia masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan Manusia Seutuhnya dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan Pemikiran Teologis

Konsep pembangunan manusia seutuhnya dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* berakar pada keyakinan bahwa manusia adalah subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek ekonomi atau politik. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa pembangunan sejati harus mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia yakni fisik, sosial, budaya, dan spiritual. Ia mengkritik pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan material, karena hal tersebut cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan memperdalam ketimpangan sosial.

“Pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal manusia dan martabatnya” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 33). Dalam konteks ini, pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan berisiko menciptakan sistem yang tidak adil dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan integral terhadap pembangunan menjadi syarat mutlak untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat (Badj, 2025).

Martabat manusia menjadi pusat dari seluruh refleksi dalam Ensiklik ini. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa setiap individu diciptakan menurut citra Allah dan memiliki nilai yang tak tergantikan. Ia mengkritik struktur sosial yang menindas dan menyerukan solidaritas sebagai kebajikan kristiani yang mampu mengatasi “struktur dosa” dalam masyarakat. “Solidaritas bukanlah sekadar perasaan samar-samar, tetapi tekad teguh dan keteguhan hati untuk berkomitmen pada kebaikan bersama” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 38).

Solidaritas dalam hal ini bukan hanya sikap moral, tetapi juga

prinsip sosial yang menuntut keterlibatan aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama, terutama bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan (Dokpen KWI, 1987). Mulyatno (2015) menegaskan bahwa solidaritas dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* merupakan komitmen dan tanggung jawab setiap orang dan bangsa untuk hidup bersama secara bermutu dalam cara yang kolaboratif dan terbuka terhadap dialog.

Solidaritas adalah wajah sosial dari perdamaian, dan perdamaian lahir dari hati setiap orang yang menghargai sesama. Dalam konteks global saat ini, ketika dunia menghadapi krisis kemanusiaan, konflik, dan ketimpangan ekonomi, solidaritas menjadi prinsip etis yang mendesak untuk dihidupi. Gereja, melalui ajaran sosialnya, menyerukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan (Supartono et al., 2024).

Prinsip subsidiaritas dalam ensiklik ini menekankan bahwa keputusan dan tindakan harus diambil sedekat mungkin dengan komunitas yang terdampak. Paus Yohanes Paulus II menyatakan, “Setiap kelompok sosial memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam pembangunan, sesuai dengan kemampuannya” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 15). Subsidiaritas mendorong pemberdayaan masyarakat dan mencegah dominasi struktural yang dapat merusak martabat manusia. Suyadi (2024) menambahkan bahwa subsidiaritas berarti komunitas tingkat lebih tinggi tidak boleh mengambil alih tugas komunitas tingkat lebih rendah, kecuali bila diperlukan. “Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri”.

Subsidiaritas bukan hanya prinsip teknis dalam tata kelola, tetapi juga etis, karena ia mengakui peran unik setiap individu dan komunitas dalam membangun dunia yang lebih manusiawi. Ketika pembangunan

dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan komunitas lokal, hasilnya cenderung lebih adil, efektif, dan bermartabat. Dalam konteks Indonesia, prinsip subsidiaritas mendukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan memperkuat kapasitas lokal dalam merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah (Khotimah, 2023).

Keadilan sosial dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar. Paus Yohanes Paulus II mengkritik sistem ekonomi global yang menciptakan kesenjangan ekstrem antara negara kaya dan miskin, serta menyerukan distribusi yang adil atas sumber daya. “Barang-barang di dunia ini harus tersedia bagi semua segi kehidupan manusia, bukan hanya untuk segelintir kelompok sosial” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 9). Ensiklik ini mempertegas perlunya keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan dunia yang adil dan damai (Dede et al. 2023).

Keadilan sosial dalam Ensiklik ini tidak hanya menyangkut distribusi ekonomi, tetapi juga mencakup struktur sosial yang memungkinkan partisipasi aktif semua orang dalam kehidupan publik. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa penindasan dan eksploitasi atas nama efisiensi ekonomi adalah bentuk ketidakadilan yang harus dilawan. Keadilan sosial adalah wujud nyata dari pembangunan yang berpihak pada martabat manusia dan menolak segala bentuk eksploitasi (Badj, 2025). Oleh karena itu, keadilan sosial harus menjadi prinsip etis dalam merancang kebijakan publik, sistem ekonomi, dan relasi internasional.

Dengan demikian, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* menawarkan kerangka etis dan spiritual yang komprehensif untuk pembangunan

manusia seutuhnya. Nilai-nilai yang diangkat oleh ensiklik ini seperti martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas, dan keadilan sosial beririsan langsung dengan tantangan pembangunan kontemporer. Integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan publik dan praksis sosial akan memperkuat fondasi moral pembangunan serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih manusiawi, inklusif, dan bermartabat.

Relevansi Konsep Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* bagi Pembangunan di Indonesia

Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* yang diterbitkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1987 merupakan refleksi moral dan sosial terhadap ketimpangan global yang semakin kompleks. Dokumen Ajaran Sosial Gereja ini menyoroti persoalan struktural dalam sistem ekonomi dunia yang menyebabkan marginalisasi dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai yang diangkat oleh ensiklik ini memiliki relevansi mendalam karena sejalan dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila tidak hanya menjadi ideologi politik, tetapi juga fondasi etis dalam merancang pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keutuhan bangsa. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa “perkembangan sejati harus mencakup seluruh pribadi manusia, termasuk dimensi rohani dan moralnya” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 33), yang sejalan dengan cita-cita pembangunan Indonesia yang holistik (Badj, 2025).

Konvergensi Konsep Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis dengan Pancasila dan Pembangunan

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, merupakan fondasi ontologis dan aksiologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai ini tidak hanya mengakui dimensi spiritual manusia, tetapi juga berfungsi sebagai sumber etika publik yang menjiwai arah dan tujuan pembangunan nasional. Dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa pembangunan yang autentik harus mencakup dimensi transenden manusia. Ia memperingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai spiritual akan menghasilkan sistem yang materialistis dan tidak manusiawi. “Tanpa dimensi rohani, pembangunan kehilangan arah dan makna” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 34).

Dalam konteks Indonesia, pembangunan nasional menghadapi tantangan multidimensi. Ketimpangan sosial yang semakin melebar, krisis etika dalam birokrasi dan kepemimpinan publik, serta arus sekularisasi yang mengikis nilai-nilai religius, menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara holistik. Ketika dimensi spiritual dan kemanusiaan dikesampingkan, pembangunan cenderung melahirkan alienasi sosial, eksklusi kelompok rentan, dan pelemahan solidaritas antarwarga (Supartono, Nugroho, & Lestari, 2024).

Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai religius dalam kebijakan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Nilai martabat manusia menuntut agar setiap kebijakan menghormati hak, harkat, dan potensi setiap individu, terutama mereka yang terpinggirkan oleh sistem. Nilai solidaritas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun

kehidupan bersama yang inklusif dan saling peduli. Sementara itu, nilai keadilan sosial menjadi prinsip utama dalam distribusi sumber daya, akses terhadap pelayanan publik, dan perlindungan terhadap kelompok lemah (Komarudin, 2021).

Ketiga nilai ini martabat manusia, solidaritas, dan keadilan sosial merupakan ekspresi konkret dari spiritualitas publik yang bersumber dari sila pertama Pancasila. Ketiga nilai ini tidak hanya sejalan dengan ajaran religius, tetapi juga berfungsi sebagai penangkal terhadap krisis etika dan sekularisasi yang mengancam arah pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, spiritualitas publik berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan kebijakan kepada tujuan yang lebih luhur, pembebasan manusia dari kemiskinan, penguatan kohesi sosial, dan penciptaan tata kehidupan yang bermartabat (Yohanes Paulus II, 1987, art. 34); Supartono et al., 2024).

Dengan menjadikan nilai Ketuhanan sebagai landasan, pembangunan tidak lagi dipahami sebagai proses teknokratis semata, melainkan sebagai gerakan moral dan sosial yang memanusiakan, menyatukan, dan membebaskan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan integral yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan objek, dari seluruh proses pembangunan. Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga etika pembangunan yang menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan (Komarudin, 2021).

Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung prinsip fundamental bahwa pembangunan harus berpijak pada penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam kerangka etika sosial, sila ini menuntut

agar kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan dan keberadaban dalam relasi sosial. Paus Yohanes Paulus II, dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, mengkritik keras sistem ekonomi yang memperlakukan manusia sebagai alat produksi. Ia menegaskan bahwa manusia harus menjadi tujuan utama pembangunan, bukan sekadar instrumen dalam proses ekonomi. “Manusia tidak boleh diperlakukan sebagai alat, tetapi sebagai tujuan pembangunan itu sendiri” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 34).

Kritik tersebut sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana pembangunan sering kali menghadapi tantangan struktural seperti eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi sosial, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Ketika pembangunan gagal menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, maka yang terjadi bukan hanya ketidakadilan, tetapi juga degradasi nilai kemanusiaan. Zirtana, Baiquni, dan Sudrajat (2025) mencatat bahwa ketimpangan sosial yang terus berlangsung telah melemahkan kohesi masyarakat dan memperbesar jurang antara kelompok dominan dan marginal.

Dalam perspektif etis, nilai martabat manusia menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil dan diberi ruang untuk berkembang secara utuh. Ini mencakup pengakuan atas hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi yang melekat pada setiap warga negara. Nilai solidaritas mendorong terciptanya relasi sosial yang saling mendukung, terutama dalam menghadapi ketimpangan struktural yang menghambat akses terhadap kesejahteraan. Sementara itu, nilai keadilan sosial menjadi prinsip utama dalam merancang kebijakan yang menjamin distribusi sumber daya secara merata dan perlindungan terhadap kelompok rentan

(Komarudin, 2021).

Martabat manusia, solidaritas, dan keadilan sosial merupakan ekspresi konkret dari sila kedua Pancasila yang harus diinternalisasi dalam seluruh proses pembangunan. Ketiga nilai ini tidak hanya sejalan dengan ajaran moral universal, tetapi juga menjadi instrumen kritis untuk menilai apakah pembangunan benar-benar memanusiakan atau justru menindas. Dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, sila kedua berfungsi sebagai etika publik yang mengarahkan kebijakan kepada tujuan yang lebih manusiawi, penghapusan eksploitasi, penguatan partisipasi sosial, dan penciptaan tata kehidupan yang bermartabat.

Dengan menjadikan nilai kemanusiaan sebagai landasan, pembangunan nasional dapat bergerak melampaui paradigma teknokratis menuju pendekatan yang lebih holistik dan transformatif. Pancasila dalam hal ini, bukan hanya ideologi negara, tetapi juga kerangka etis yang menjamin bahwa pembangunan berjalan selaras dengan nilai-nilai keadilan, keberadaban, dan penghormatan terhadap manusia sebagai subjek utama pembangunan.

Sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia”, mengandung makna mendalam tentang pentingnya membangun integrasi sosial di tengah keragaman bangsa. Persatuan bukan sekadar keseragaman, melainkan keterikatan yang dibentuk melalui pengakuan terhadap perbedaan dan komitmen untuk hidup bersama secara adil dan bermartabat. Dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa solidaritas adalah kebajikan yang melampaui empati pasif; ia merupakan dorongan moral untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama secara aktif. “Solidaritas adalah kebajikan kristiani yang

menggerakkan manusia untuk melihat sesama sebagai saudara, bukan sebagai alat” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 39).

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, nilai solidaritas menjadi elemen kunci dalam menjaga kohesi sosial dan mengatasi fragmentasi akibat perbedaan etnis, agama, dan status ekonomi. Mulyatno (2015) menyatakan bahwa tanpa solidaritas yang berbasis pada keadilan dan pengakuan terhadap martabat manusia, persatuan hanya akan menjadi slogan kosong yang rentan terhadap konflik dan eksklusi sosial. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus dirancang sebagai proses yang memperkuat ikatan sosial melalui partisipasi inklusif dan distribusi sumber daya yang adil.

Nilai martabat manusia dalam sila ketiga menuntut agar setiap warga negara diperlakukan sebagai subjek yang setara dalam kehidupan berbangsa, tanpa diskriminasi berdasarkan identitas kultural atau ekonomi. Nilai solidaritas mendorong terciptanya relasi sosial yang saling mendukung, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada dominasi kelompok tertentu. Sementara itu, nilai keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun struktur masyarakat yang memungkinkan semua kelompok untuk berkontribusi dan menerima manfaat pembangunan secara proporsional (Komarudin, 2021).

Martabat manusia, solidaritas, dan keadilan sosial merupakan fondasi etis dari sila ketiga yang harus diinternalisasi dalam kebijakan pembangunan. Ketiga nilai ini, bukan hanya kompatibel dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat integrasi nasional secara substansial. Dalam kerangka pembangunan yang berorientasi pada transformasi sosial, sila ketiga berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan ruang hidup bersama yang

inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan menjadikan nilai persatuan sebagai landasan, pembangunan nasional dapat diarahkan untuk membangun masyarakat yang tidak hanya terhubung secara administratif, tetapi juga secara moral dan sosial. Pancasila, dalam hal ini, berperan sebagai etika kolektif yang mengarahkan pembangunan menuju tatanan sosial yang menghargai keberagaman, memperkuat solidaritas, dan subsidiaritas. Fokus utama pada sila ketiga ini adalah partisipasi demokratis, kebijaksanaan kolektif, dan penguatan kapasitas lokal, yang dikaitkan dengan prinsip subsidiaritas dan nilai-nilai martabat manusia, solidaritas, serta keadilan sosial.

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan publik. Nilai ini tidak hanya mencerminkan semangat demokrasi deliberatif, tetapi juga mengandung prinsip etis bahwa kebijakan pembangunan harus lahir dari proses musyawarah yang inklusif dan berbasis pada kebijaksanaan bersama. Dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Paus Yohanes Paulus II menegaskan prinsip subsidiaritas sebagai landasan moral dalam tata kelola sosial. Ia menyatakan bahwa “setiap kelompok sosial memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 15), dan bahwa keputusan sebaiknya diambil sedekat mungkin dengan komunitas yang terdampak (Badj, 2022).

Prinsip ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, terutama dalam era desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi bukan sekadar pemindahan kewenangan administratif, tetapi merupakan upaya

untuk memperkuat kapasitas lokal dalam merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Suyadi (2024) menekankan bahwa desentralisasi yang berbasis pada prinsip subsidiaritas dapat meningkatkan efektivitas pembangunan, memperluas partisipasi warga, dan memperkuat akuntabilitas publik.

Nilai martabat manusia dalam sila keempat tercermin dalam pengakuan terhadap hak setiap warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Nilai solidaritas mendorong terciptanya ruang deliberatif yang memungkinkan berbagai kelompok sosial untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya secara setara. Sementara itu, nilai keadilan sosial menjadi prinsip utama dalam memastikan bahwa hasil dari proses permusyawaratan benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama dan tidak didominasi oleh kepentingan segelintir elit (Komarudin, 2021, pp. 96–98).

Ketiga nilai tersebut martabat manusia, solidaritas, dan keadilan sosial menjadi fondasi etis dari sila keempat yang harus diinternalisasi dalam praktik pembangunan. Hal tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi demokrasi lokal, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghindari sentralisasi kekuasaan yang berpotensi menindas. Dalam kerangka pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan, sila keempat berfungsi sebagai pedoman untuk membangun tata kelola yang inklusif, transparan, dan berbasis pada kebijaksanaan kolektif.

Dengan menjadikan nilai kerakyatan sebagai landasan, pembangunan nasional dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas komunitas lokal sebagai aktor utama dalam perubahan sosial. Pancasila dalam hal ini, bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai

etika demokrasi yang menjamin bahwa pembangunan berlangsung melalui proses yang menghormati suara rakyat, mengedepankan musyawarah, dan menghasilkan keputusan yang bijaksana serta berkeadilan.

Sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, merupakan titik simpul antara etika pembangunan nasional dan ajaran moral universal tentang distribusi yang adil. Nilai ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir kelompok, melainkan harus menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Paus Yohanes Paulus II mengkritik keras sistem ekonomi global yang menciptakan kesenjangan ekstrem antara negara kaya dan miskin. Ia menekankan bahwa “barang-barang di dunia ini harus tersedia bagi semua segi kehidupan manusia, bukan hanya untuk segelintir kelompok sosial” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 9).

Dalam konteks Indonesia, tantangan keadilan sosial tercermin dalam berbagai bentuk ketimpangan struktural, seperti disparitas antarwilayah, eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar, dan marginalisasi kelompok miskin dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Khotimah et al. mencatat bahwa ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperlemah kohesi sosial dan memperbesar risiko konflik horizontal (Khotimah et al., 2023).

Nilai martabat manusia dalam sila kelima menuntut agar setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang hidup yang layak. Ini mencakup hak atas tanah, air, pendidikan, dan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak dasar yang tidak boleh

dikomodifikasi (Badj, 2022). Nilai solidaritas mendorong tanggung jawab kolektif dalam mengatasi ketidaksetaraan, di mana kelompok yang lebih kuat secara ekonomi dan politik turut serta dalam memperjuangkan hak kelompok yang terpinggirkan. Sementara itu, nilai keadilan sosial menjadi prinsip utama dalam merancang sistem distribusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Komarudin, 2021).

Martabat manusia, solidaritas, dan keadilan sosial merupakan fondasi etis dari sila kelima yang harus diinternalisasi dalam seluruh proses pembangunan. Ketiga nilai ini tidak hanya relevan secara moral, tetapi juga secara struktural, karena menyentuh akar persoalan ketimpangan yang bersifat sistemik. Dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sila kelima berfungsi sebagai koreksi terhadap model pembangunan yang eksploitatif dan eksklusif, serta sebagai pedoman untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan bermartabat.

Dengan menjadikan nilai keadilan sosial sebagai landasan, pembangunan nasional dapat diarahkan untuk membangun sistem ekonomi dan sosial yang berpihak pada kesejahteraan kolektif. Pancasila, dalam hal ini, bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai kerangka distribusi etis yang menjamin bahwa pembangunan tidak menjadi alat dominasi, melainkan sarana pembebasan dan pemulihan martabat manusia.

Selain kesesuaian dengan sila-sila Pancasila, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* juga relevan dengan arah pembangunan nasional Indonesia yang menekankan prinsip *good governance*, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Dede et al. menegaskan bahwa ensiklik ini memperkuat perlunya keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab

bersama untuk menciptakan dunia yang adil dan damai (Dede et al., 2023). Nilai-nilai yang diangkat oleh ensiklik ini, seperti keadilan, solidaritas, dan perlindungan lingkungan, memiliki relevansi universal dan dapat membimbing tindakan dalam mengatasi tantangan globalisasi.

Oleh karena itu, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dapat menjadi sumber inspirasi etis dan moral dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Indonesia. Nilai-nilai yang diangkat oleh ensiklik ini seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, subsidiaritas, dan keadilan sosial beririsan langsung dengan semangat Pancasila dan cita-cita pembangunan nasional. Integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan publik dan praksis sosial akan memperkuat fondasi moral pembangunan serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih manusiawi, inklusif, dan bermartabat.

Implementasi Prinsip Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis dalam Kebijakan Publik

Prinsip-prinsip etis yang terkandung dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* memberikan fondasi moral yang kuat bagi perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan martabat manusia. Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa pembangunan tidak boleh dipahami semata sebagai proses ekonomi, melainkan sebagai usaha menyeluruh untuk memajukan manusia dalam seluruh dimensinya. Ia menulis, “Pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal manusia dan martabatnya” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 33). Pernyataan ini menuntut agar kebijakan publik di Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Dalam ranah sosial, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*

menggarisbawahi pentingnya solidaritas sebagai kebajikan yang harus diwujudkan dalam struktur kebijakan. Solidaritas bukanlah perasaan samar-samar, melainkan tekad teguh untuk berkomitmen pada kebaikan bersama (Yohanes Paulus II, 1987, art. 38). Pembangunan yang tidak berpihak kepada kemanusiaan harus dikoreksi melalui pendekatan etis yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Hal ini relevan dengan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, seperti program bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan nasional, dan pemberdayaan komunitas miskin (Badj, 2025).

Di sektor pendidikan, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* mendorong pembentukan manusia yang utuh melalui proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial dan kesadaran ekologis. Mulyatno menekankan bahwa pendidikan harus menjadi ruang dialog dan kolaborasi untuk membangun kehidupan bersama yang bermutu (Mulyatno, 2015). Prinsip subsidiaritas yang diangkat dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* juga mendorong pelibatan komunitas lokal dalam perumusan kebijakan pendidikan. Suyadi menambahkan bahwa subsidiaritas dan solidaritas adalah dua prinsip yang saling melengkapi dalam membangun kesejahteraan bersama (Suyadi, 2024). Dalam konteks Indonesia, hal ini mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan dan penguatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan lingkungan hidup di Indonesia memiliki peluang besar untuk diperkaya melalui prinsip-prinsip etis yang terkandung dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*. Eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung secara masif dan tidak terkendali dipandang sebagai manifestasi dari ketidakadilan ekologis yang mengancam keberlanjutan

hidup manusia dan ciptaan. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa “barang-barang di dunia ini harus tersedia bagi semua segi kehidupan manusia, bukan hanya untuk segelintir kelompok sosial” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 9) yang menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya alam merupakan hak universal, bukan privilese eksklusif.

Silvester Adinuhgra, dalam kajiannya menginterpretasikan eksploitasi lingkungan dalam perspektif Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* sebagai bentuk keprihatinan Gereja terhadap ketimpangan ekologis yang secara langsung berdampak pada kelompok miskin dan terpinggirkan (Adinuhgra, 2024). Ia menekankan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan moral yang menuntut tanggung jawab kolektif. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki kekayaan biodiversitas sekaligus menghadapi ancaman deforestasi, pencemaran, dan krisis iklim, prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan landasan etis untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Integrasi prinsip-prinsip Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dalam kebijakan publik menuntut pendekatan lintas sektor yang menghubungkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis. Nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan perlindungan lingkungan dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* memiliki relevansi universal dan dapat membimbing tindakan dalam mengatasi tantangan globalisasi (Dede et al. 2024). Ajaran Sosial Gereja menyediakan pendekatan multidimensi terhadap kebijakan publik yang menghubungkan pembangunan ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan secara integral (O’Brien, 2023).

Dalam konteks global, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* menyerukan pembaruan sistem perdagangan dan ekonomi yang

eksploitatif. McKenna (2022) menyatakan bahwa Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* memposisikan pembangunan sebagai imperatif moral, bukan sekadar tantangan teknis atau ekonomi. Hal ini relevan dengan kebijakan fiskal dan perdagangan Indonesia yang perlu diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dalam kebijakan publik Indonesia dapat memperkuat legitimasi moral negara dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan martabat manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan bermartabat.

Tantangan Kontekstual di Indonesia

Ketimpangan Sosial Ekonomi

Ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia merupakan tantangan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada distribusi pendapatan, tetapi juga pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, distribusi hasil pembangunan belum merata secara geografis maupun demografis. Hamdhan Sari dan Santoso (2024) mencatat bahwa meskipun beberapa provinsi tergolong sebagai ekonomi inklusif, ketimpangan pendapatan antarwilayah menunjukkan tren peningkatan, terutama sejak tahun 2017 hingga 2023. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif dan berkeadilan.

Analisis panel terhadap 62 kabupaten tertinggal di Indonesia

menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi memiliki korelasi positif terhadap tingkat kemiskinan. menemukan bahwa ketimpangan pendidikan, kesenjangan gender dalam literasi, serta disparitas kesehatan berkontribusi signifikan terhadap kemiskinan struktural di daerah tertinggal. (Zirtana, Baiquni, & Sudrajat, 2025). Artinya bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari strategi pengurangan ketimpangan sosial ekonomi secara komprehensif.

Dari perspektif distribusi pendapatan, studi oleh Prasetyo dan Wibowo menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia masih berada pada kategori sedang yaitu sekitar 0,39, yang berarti bahwa distribusi pendapatan belum merata (Prasetyo & Wibowo, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat mobilitas sosial dan memperkuat stratifikasi ekonomi. Ketimpangan ini juga berdampak pada partisipasi politik dan stabilitas sosial, karena kelompok masyarakat yang terpinggirkan cenderung mengalami alienasi dari proses pembangunan.

Dalam konteks kebijakan, pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro sering kali mengabaikan dimensi keadilan distributif. Studi oleh Sari dan Santoso (2024) menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan redistributif melalui investasi pada infrastruktur dasar, pengembangan modal manusia, dan perluasan program kesejahteraan sosial. Artinya bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus mengintegrasikan produktivitas ekonomi dengan pemerataan hasil pembangunan.

Ajaran Sosial Gereja, khususnya dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* memberikan kerangka moral yang kuat untuk mengatasi ketimpangan ini. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa “struktur

Pembangunan Manusia Seutuhnya (Bernardus Badi)

dosa” dalam masyarakat modern hanya dapat diatasi melalui solidaritas dan komitmen terhadap kebaikan bersama (Yohanes Pulus II art. 36). Prinsip ini menuntut agar kebijakan publik di Indonesia tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada martabat manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia bukan sekadar persoalan statistik, melainkan tantangan etis dan struktural yang menuntut respons kebijakan yang holistik. Integrasi prinsip-prinsip etis dalam perumusan kebijakan publik menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat.

Krisis Spiritual dan Etika Pembangunan

Pembangunan di Indonesia, meskipun berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur, menghadapi tantangan serius dalam dimensi spiritual dan etika. Modernisasi yang berorientasi pada efisiensi dan materialisme telah menggeser nilai-nilai transenden yang selama ini menjadi fondasi moral masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya menghadapi krisis teknis, tetapi juga krisis makna (Supartono et al., 2024).

Spiritualitas lokal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Supartono et al. menunjukkan bahwa spiritualitas sebagai bagian dari budaya lokal berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan pembangunan, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (Supartono et al., 2024). Pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai spiritual cenderung melahirkan kebijakan yang tidak berakar pada kearifan lokal dan menimbulkan alienasi sosial. Dalam kerangka yang

sama, krisis spiritual juga tampak dalam degradasi etika publik, ketika moralitas sosial melemah dan kepentingan material menguasai kebijakan pembangunan.

Nugraha dan Huda, melalui kajian atas pemikiran Seyyed Hossein Nasr, menegaskan bahwa krisis lingkungan global merupakan manifestasi dari krisis spiritual yang lebih mendalam (Nugraha & Huda, 2024). Oleh karena itu, pendidikan holistik dan kesadaran spiritual diperlukan untuk membangun etika pembangunan yang manusiawi dan berkelanjutan. Dalam konteks sosial, penurunan etika dan moral terutama di kalangan generasi muda menjadi indikator nyata krisis spiritual bangsa. Hudi et al. menjelaskan bahwa krisis ini dipengaruhi oleh faktor keluarga, pendidikan, budaya, dan penyalahgunaan teknologi, yang berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat (Hudi et al., 2024). Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai religius menjadi langkah strategis dalam membangun kembali fondasi etika publik.

Ajaran Sosial Gereja memberikan kerangka moral yang kokoh dalam menanggapi krisis ini. Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* menegaskan bahwa pembangunan sejati harus melibatkan dimensi spiritual manusia, sebab “tanpa dimensi rohani, pembangunan kehilangan arah dan makna” (Yohanes Paulus II, 1987, art. 34). Dalam terang ensiklik ini, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemakmuran material, tetapi juga pada pembentukan pribadi manusia yang bermartabat, berbelarasa, dan bertanggung jawab terhadap sesama serta seluruh ciptaan.

Dengan demikian, krisis spiritual dan etika pembangunan di Indonesia menuntut pendekatan yang lebih integral dan transformatif. Integrasi nilai-nilai spiritual, pendidikan karakter, dan etika publik dalam

kebijakan pembangunan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, adil, dan berkelanjutan (Nugraha & Huda, 2024)..

Sekularisasi dan Marginalisasi Nilai-nilai Transenden

Dalam lanskap pembangunan kontemporer Indonesia, sekularisasi telah menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan. Proses ini ditandai oleh pelepasan nilai-nilai transenden dari ruang publik, serta pemisahan antara dimensi spiritual dan kebijakan negara. Sekularisasi bukan sekadar pergeseran institusional, melainkan transformasi paradigma yang menggeser orientasi pembangunan dari nilai-nilai luhur menuju rasionalitas teknokratik dan materialistik.

Suhandi menjelaskan bahwa sekularisasi di Indonesia merupakan proses pelepasan kehidupan sosial dari dominasi institusi keagamaan, yang berdampak pada penataan ulang konsep kenegaraan dan peran agama dalam kebijakan publik (Suhandi 2015). Ia menekankan bahwa sekular adalah sifat melepaskan dunia ini dari agama, dan proses ini disebut sekularisasi. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, marginalisasi nilai-nilai transenden berisiko mengikis fondasi spiritual yang selama ini menopang etika sosial dan politik.

Khotimah et al. dalam kajiannya mengenai peradaban pemikiran di Indonesia menyatakan bahwa sekularisasi telah memaksa penyesuaian terusmenerus terhadap pandangan dunia umat beragama, khususnya Islam (Khotimah et al., 2023). Mereka mencatat bahwa “kenisbian pranata dan institusi-institusi duniawi menciptakan tekanan terhadap nilai-nilai transenden yang selama ini menjadi acuan moral masyarakat”. Fenomena ini berdampak pada reduksi agama menjadi sekadar ekspresi privat,

bukan sumber nilai publik.

Pachor membedakan antara sekularisasi dan sekularisme. Ia menyatakan bahwa sekularisasi adalah proses pelepasan kehidupan dari dominasi institusi agama, sedangkan sekularisme adalah ideologi yang menolak keberadaan tatanan sakral (Pachor, 2016). Dalam konteks pembangunan, sekularisme dapat melahirkan kebijakan yang steril secara moral dan tidak berakar pada nilai-nilai spiritual bangsa. Dalam terang Ajaran Sosial Gereja, khususnya Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, marginalisasi nilai-nilai transenden merupakan bentuk krisis spiritual yang harus direspons secara serius.

Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa pembangunan sejati harus mencakup dimensi rohani manusia, karena “tanpa dimensi spiritual, pembangunan kehilangan arah dan makna” (Yohanes Paulus II, art. 34). Nilai-nilai transenden seperti solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab ekologis bukan hanya prinsip moral, tetapi juga fondasi etis bagi kebijakan publik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, sekularisasi dan marginalisasi nilai-nilai transenden di Indonesia menuntut pendekatan pembangunan yang lebih integral. Integrasi spiritualitas dalam kebijakan publik bukanlah bentuk regresi, melainkan upaya untuk mengembalikan pembangunan pada orientasi kemanusiaan yang utuh. Negara perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya rasional secara teknis, tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia seutuhnya, sebagaimana ditegaskan dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, menawarkan kerangka etis yang komprehensif untuk menila dan merancang kebijakan pembangunan di Indonesia. Dengan menempatkan martabat manusia sebagai pusat, dan menjadikan solidaritas, keadilan sosial, serta tanggung jawab kolektif sebagai prinsip-prinsip utama, Ensiklik ini tidak hanya memberikan kritik terhadap sistem ekonomi global yang eksploitatif, tetapi juga menyajikan alternatif normatif yang relevan bagi negara-negara berkembang. Kontribusi dari tulisan ini terletak pada upaya mengintegrasikan Ajaran Sosial Gereja Katolik ke dalam analisis pembangunan nasional berbasis Pancasila. Dengan menjadikan Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* sebagai teks primer, tulisan ini berhasil mengelaborasi hubungan antara spiritualitas publik dan etika pembangunan dalam konteks Indonesia yang multikultural dan pluralistik. Pendekatan ini memperkaya diskursus pembangunan yang selama ini didominasi oleh paradigma teknokratik dan ekonomi-sentris.

Namun, implementasi gagasan pembangunan manusia seutuhnya di Indonesia masih menghadapi tantangan kontekstual yang kompleks. Ketimpangan antarwilayah, krisis etika dalam birokrasi, dan marginalisasi nilai-nilai transenden dalam arus sekularisasi menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang utuh. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemulihan etika sosial, penguatan spiritualitas publik, dan integrasi nilai-nilai transenden dalam tata kelola nasional. Dengan

demikian, pembangunan di Indonesia dapat diarahkan menuju transformasi yang lebih manusiawi, inklusif, dan bermartabat, sejalan dengan visi pembangunan integral yang ditawarkan oleh Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*. Tulisan ini merekomendasikan agar kebijakan publik di Indonesia mulai mengadopsi pendekatan etis yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek statistik atau target ekonomi.

Referensi

- Adinuhgra, S. (2024). Orang Muda Katolik Sebagai Agen Perubahan: Implementasi *Gaudium Et Spes* dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, 3(1), 102–115. <https://doi.org/10.55606/jutipa.v3i1.435>
- Badj, B. (2023). Konsep Pembangunan Perspektif Peter L. Berger. *Pos Kupang*. <https://kupang.tribunnews.com/2023/02/13/opini-bernadus-badj-konsep-pembangun-dalam-perspektif-peter-l-berger>, diakses pada 10 Agustus 2025.
- Badj, B. (2024). Relavanasi Etika Politik Peter L. Berger bagi Pembangunan Pariwisata di Indonesia. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Teologi*, 15(2), 193–211 (<https://journal.unwira.ac.id/index.php/LUMENVERITATIS>)
- Badj, B. (2025). *Pembangunan Manusia Seutuhnya dalam Terang Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis dan Implikasinya bagi Pembangunan di Indonesia*. Skripsi IFTK Ledalero. Maumere.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dede, at. al (2023). Relationship Between Landscape and River Ecosystem Services Global. *Journal of Environmental Science and Management*, 9(3), 637–652. <https://doi.org/10.22035/gjesm.2023.03.18>.
- Hamdhan Sari, P., & Santoso, R. P. (2024). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia periode 2012–2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 3(2), 220–226.

<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art12>

- Hudi, F., et al. (2024). Media Relations Strategy of the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Defense in Detecting Hoax News in Online Media. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 13(1), 44–55.
- Komarudin, A. (2021). *Pancasila sebagai Etika Pembangunan: Perspektif Filsafat Sosial*. Yogyakarta: Gama Press.
- Khotimah, R. P., et al. (2023). *The Effectiveness of the Stemdislearn Module in Improving Students' Critical Thinking Skills in the Differential Equations Course*. *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2220233>
- Konferensi Waligereja Indonesia. (1987). *Keprihatinan Akan Masalah Sosial: Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis Paus Yohanes Paulus II. Seri Dokumen Gerejawi No. 3*. Jakarta: Dokpen KWI.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2017). *Panggilan Gereja Menyucikan Dunia: Rangkuman hasil Sidang Tahunan KWI 2017*. Sekretariat Jenderal KWI.
- Lonergan, B. (1973). *Method in theology*. London: Darton, Longman & Todd.
- Mulyatno, C. B., Riyanto, A., Ohoitumur, J., & Madung, O. G. (Eds.). (2015). *Kearifan lokal–Pancasila: Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nugraha, N., & Maya Sari. (2024). *Cultivating Financial Resilience: Illuminating the Nexus of Financial Literacy, Corruption Perception, and Sustainable debt Strategies in Ghana*. In G. Ahiase, N. Nugraha, M. Sari, & D. Andriana (Eds.), *Proceedings of the 2024 International Conference on Finance and Economics* (pp. xxx–xxx). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-443-3_25
- O'Brien, C. (2023). *What are the most Effective Digital Marketing Strategies?* Scientific Research Publishing. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3740178>.
- Pachor, R. D. A. (2016). Sekularisasi dan Sekularisme Agama. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 1(1), 91–102. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v1i1.1372>
- Paus Yohanes Paulus II. *Sollicitudo Rei Socialis*. Penerj. Petrus Turang.

Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.

- Suhandi, S. (2015). *The Three Tier-Test for Identification the Quantity of Students' Misconception on Newton's first laws*. Global Illuminators Publishing, 2, 313–319.
- Supartono, A. R., et al. (2024). Spiritualitas dalam Perspektif Pembangunan (Studi kasus: Beberapa daerah di Indonesia). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(5), 2952–2969.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5.15233>
- Suyadi, S. (2024). *Modul Mengatur Akomodasi Transportasi dan Anggaran Perjalanan Dinas*. Kemendikbud.
<http://repositori.kemendikdasmen.go.id/id/eprint/32970>.
- Suyadi, T. (2024). *Desentralisasi dan Etika Subsidiaritas dalam Pembangunan Lokal*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Wibowo, A. P., & Lutfiana, R. F. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi di Era Disrupsi*. UMMPress.
<https://ummpress.umm.ac.id/buku/detail/pendidikan-kewarganegaraan-untuk-perguruan-tinggi-di-era-disrupsi>.
- Zirtana, H., Baiquni, M., & Sudrajat, S. (2025). Pengaruh Ketimpangan Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal Indonesia: Analisis Data Panel 2015–2021. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 16(1), 35–51.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v16i1.3260>